

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Agung berwenang antara lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan uji materiil tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016 yang secara jelas menyatakan bahwa kewenangan uji materiil terhadap Perda merupakan wewenang Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan uji materi muatan peraturan perundang-undangan (*judicial review*) di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *judicial review* terhadap suatu peraturan daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan *judicial review* peraturan daerah oleh Mahkamah Agung diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti halnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Selain itu terdapat kendala dalam pelaksanaan *judicial review* terhadap peraturan daerah oleh Mahkamah Agung.

Kata Kunci : *Judicial Review*, Mahkamah Agung, Peraturan Daerah

ABSTRACT

Based on Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Supreme Court has the authority to, among other things, examine statutory regulations under law against laws. The authority for judicial review also strengthened by the existence of the Constitutional Court Decision No. 137 / PUU-XIII / 2015 and No. 56 / PUU-XIV / 2016 which clearly states that the authority for judicial review of Local Government Regulation is authority of Supreme Court. This research is aims to determine the procedure for implementing judicial review under laws against a higher level of legislation, and then to find out the obstacles faced in implementing a judicial review of a regional regulation

.The research method used in writing this law is normative juridical. The specification used in research in this study is the literature study method. The data collection method was done by the writer using primary data and secondary data.

The results of this research showed that the procedure for implementing judicial review of Local Government Regulation by the Supreme Court is regulated in a number of laws and regulations in Indonesia such as the Supreme Court Regulation Number 1 of 2011 concerning Material Judicial Rights. In addition, there are obstacles in the implementation of judicial review of Local Government Regulation by the Supreme Court.

Word Keys : Judicial review, Supreme Court, Regional Regulation